



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Direktur Utama PT Bio Farma.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 14 Januari 2021
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: Penjelasan tentang ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. 49 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran; C. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., beserta jajaran. D. Direktur Utama PT Bio Farma: Honesti Basyir.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Direktur Utama PT Bio Farma merupakan kelanjutan dari Rapat tanggal 13 Januari 2021, dibuka pukul 10.20 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berjalan dengan baik diantaranya sebagai berikut:
 - a. Memastikan ketersediaan vaksin yang memenuhi aspek keamanan, khasiat mutu, sesuai perhitungan kebutuhan, sarana prasarana pendukung dan logistik vaksinasi lainnya, termasuk memiliki rencana cadangan (*back up plan*) dalam hal terjadi hal yang tidak terduga ;
 - b. Memastikan pendanaan pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 tahun 2021 dengan tidak mengganggu anggaran program prioritas nasional di bidang kesehatan dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. Memastikan kesiapan mekanisme distribusi dan manajemen vaksin termasuk sarana prasarana dan logistik rantai dingin sesuai standar;
 - d. Menjamin kesiapan baik dari sisi kuantitas dan kualitas dari fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana pelayanan vaksinasi;
 - e. Memastikan kapasitas vaksinator terlatih secara kuantitas dan kualitas serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam program vaksinasi;
 - f. Segera memastikan validitas dan reliabilitas data sasaran penerima vaksin;
 - g. Tidak mengedepankan ketentuan dan/ atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima Vaksin COVID-19;
 - h. Mempersiapkan sarana prasarana termasuk pembiayaannya untuk mendukung pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) termasuk monitoring dan evaluasinya; dan
 - i. Mengintensifkan advokasi dan sosialisasi kampanye vaksinasi dengan melibatkan pemerintah daerah, pejabat publik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI berkoordinasi dengan Kemenristek/BRIN untuk terus melakukan percepatan pengembangan kandidat vaksin Merah Putih dan kandidat vaksin produk dalam negeri lainnya dengan tetap mempertimbangkan protokol wajib dalam proses pengembangan vaksin serta memastikan khasiat, mutu, dan keamanannya.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengutamakan satu skema kerjasama pada setiap kandidat vaksin COVID-19 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan upaya penanganan COVID-19 dengan mengambil kebijakan khusus terkait:
 - a. Mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui penguatan pelaksanaan protokol kesehatan;
 - b. Peningkatan kuantitas tempat tidur (TT) bagi pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit baik vertikal maupun non-vertikal;
 - c. Memastikan peningkatan sarana prasarana dan kesiapan seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda terdepan untuk mampu menangani penyakit katastropik yang membutuhkan pemantauan pasien secara rutin sehingga meminimalisir rujukan pasien ke rumah sakit di masa pandemi ini;
 - d. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan kebijakan pemberian relaksasi Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) di masa pandemi dengan tetap memperhatikan kualitas, demi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan baik dari segi jumlah, jenis maupun distribusi guna menyikapi kekurangan tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga lainnya melakukan hilirisasi inovasi alat kesehatan produksi dalam negeri khususnya Genose guna mempercepat proses *tracing, testing, treatment* (3T) COVID-19.
 - f. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penggerak masyarakat guna upaya penanggulangan pandemi COVID-19.
5. Demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia, Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI, untuk:
 - a. Mengawal dan mengevaluasi proses uji klinik fase 3 untuk memastikan efikasi dan keamanan vaksin CoronaVac sampai dengan pengamatan 6 (enam) bulan yaitu bulan Maret 2021;

- b. Melakukan evaluasi terhadap kandidat vaksin sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan persetujuan Penggunaan Saat Darurat (*Emergency Use Authorization*) secara mandiri dan transparan;
 - c. Bersama Kementerian Kesehatan RI, Komnas dan Komda KIPi secara intensif melakukan pemantauan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPi).
6. Komisi IX DPR RI mendesak PT Bio Farma (Persero) untuk bertanggungjawab penuh menjaga mutu, keamanan dan waktu produksi CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech Ltd. dan PT Bio Farma (Persero) yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 18.10 WIB.

Jakarta, 14 Januari 2021

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.
A-393